

BAB III

KASUS PEMBUNUHAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)

Tujuan didirikanya Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu suatu masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

Telah banyak program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sejak dari zaman pemerintahan Presiden Ir. Soekarno sampai pemerintahan sekarang Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuan pembangunan tersebut tiada lain agar terwujud kemakmuran pangan, sandang, papan dan lain-lainya.

Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah diberbagai bidang kehidupan masyarakat adalah untuk mewujudkan cita-cita alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antar alain menyebutkan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Namun apa yang tercantum dalam alenia ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa masih jauh dari harapan dan kenyataan pembangunan. Pembangunan hampir dapat dikatakan terfokus di pulau Jawa, di kota-kota besar di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya) juga daerah di luar Pulau Jawa seperti di Provinsi Sumatera Utara (Medan), Makasar (Sulawesi Selatan). Akan tetapi di daerah-daerah timur Indonesia terutama di Papua pembangunan tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan. Daerah-daerah di Papua jauh tertinggal pembangunannya di dalam hampir semua sektor.

Meskipun Pulau Papua mempunyai kekayaan alam yang luar biasa (pertambangan tembaga, emas di Jaya Pura terkenal dengan PT. Freeport (milik perusahaan Amerika), serta hasil lautnya berbagai biota laut, hasil hutannya begitu luas, namun kekayaan tersebut seperti tidak berharga bagi masyarakat Papua sampai saat ini pun keadaan ekonomi masih dikatakan kurang dan menyedihkan.

Bertolak pembangunan yang tidak merata dari segala sektor pengembangan pembangunan. Kekayaan alam semakin hari semakin dikuras oleh pihak luar, tetapi hasil pembangunannya tidak dapat dinikmati oleh rakyat Papua sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan ditambah suatu pergerakan yang dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Gerakan (OPM) menghendaki berdirinya suatu Negara Papua yang merdeka, yang terlepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Rakyat Papua ingin mengatur

negaranya sendiri secara berdaulat baik keluar maupun ke dalam terlepas dari NKRI. OPM melakukan gerakan-gerakan tertentu baik politik dan militer untuk mencapai tujuan tersebut.

Kecemburuan-kecemburuan disegala lapangan kehidupan inilah yang menyebabkan lahirnya OPM, yang menghendaki berdirinya Negara Papua Merdeka yang terlepas dari NKRI, hal mana jelas mendapat reaksi keras dari pemerintah antara lain dengan melakukan operasi militer terhadap gerakan separatis OPM ini, disamping dilakukan perundingan antara pemerintah dengan tokoh-tokoh adat di Papua.

Telah banyak yang meninggal dunia dari operasi militer (ABRI) terhadap anggota-anggota OPM, namun perjuangan mereka (OPM) tidak mengenal kata menyerah. OPM mengibarkan bendera OPM pada hari-hari tertentu, untuk menunjukkan eksistensinya bahwa OPM masih ada di tanah Papua.

Kasus meninggalnya anggota OPM., dan juga anggota militer (ABRI) dalam kontak senjata ini, harus dihindari, karena kita adalah sesama anak bangsa, bangsa Indonesia dan penyelesaian yang terbaik adalah melakukan perundingan-perundingan yang menyenangkan, menguntungkan kedua belah pihak, melakukan pembangunan-pembangunan disegala bidang kehidupan di Papua guna peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.